



**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN
EKONOMI KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2011-2017**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
pada Universitas Negeri Semarang**

Oleh:

Nadya Zaqiyatun Nuha

NIM 7111414090

**JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2019**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada :

Hari : Rabu

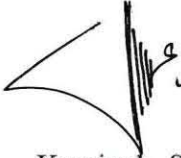
Tanggal : 27 Februari 2019

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan,

Faruqda, S.E., M.Sc.
NIP.198502162008122004

Pembimbing



Karsinah, S.E., M.Si.
NIP.197010142009122001

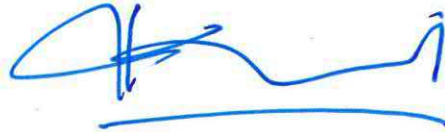
PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas
Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 4 April 2019

Penguji 1



Dr. Amin Pujiati, S.E., M.Si.
NIP. 196908212006042001

Penguji II



Yozi Aulia Rahman, S.E., M.Sc.
NIP. 198701222014041001

Penguji III



Karsinah, S.E., M.Si.
NIP. 197010142009122001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi



The stamp is a purple circular seal with a five-pointed star in the center. The text around the star reads 'KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI' at the top, 'UNNES' in the middle, and 'FAKULTAS EKONOMI' at the bottom. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Dr. Heri Yanto, MBA., Ph.D.
NIP.196307181987021001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadya Zaqiyatun Nuha

NIM : 7111414090

Tempat Tanggal Lahir : Kudus, 19 Oktober 1996

Alamat : Desa Kedungsari, Rt 04 Rw 04 Gebog Kudus

menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, April 2019



Nadya Zaqiyatun Nuha

NIM7111414090

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Ikhlas sabar dan syukur, hargai setiap langkah kecil yang pernah di lakukan
Jangan merasa sepi ketika orang-orang terdekat mu mulai meninggalkan mu,
karena yang datang pasti akan pergi, kecuali Allah yang Maha Abadi
Kerja cerdas bukan kerja keras.

PERSEMBAHAN

Untuk Kedua Orangtua Saya

Keluarga Saya

Serta Teman-teman Saya

Almamater Universitas Negeri Semarang

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul ‘‘Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2017’’. Penulis menyadari telah banyak menerima bimbingan, saran, motivasi dan do’a serta dukungan dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. oleh karena itu, dengan ketulusan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Prof Dr.Fathur Rokhman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang
2. Drs. Heri Yanto, MBA, Ph.D., Dekan Fakultas Ekonomi yang telah mengesahkan skripsi ini.
3. Fafurida, S.E., M.Sc, Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan yang telah memberikan persetujuan terhadap skripsi ini.
4. Karsinah, S.E., M.Si, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dr. Amin Pujiati, S.E., M.Si, selaku Dosen penguji I yang telah memberikan kritik dan saran membangun untuk perbaikan skripsi ini.
6. Yozi Aulia Rahman, S.E., M.Sc, selaku Dosen penguji II yang telah memberikan kritik dan saran membangun untuk perbaikan skripsi ini.

7. Dr.Amin Pujiati, S.E., M.Si selaku dosen wali Ekonomi Pembangunan B 2014 yang senantiasa memberikan arahan, saran dan motivasi kepada penulis dalam menempuh studi.
8. Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan selama masa studi.
9. Teman-teman jurusan Ekonomi Pembangunan 2014 yang selalu memberikan semangat dan telah berkenan untuk berbagai ilmu kepada penulis.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan Karunia-Nya atas kebaikan yang telah diberikan. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih belum sempurna. Jika masih ada kritik dan saran yang membangun demi lebih sempurnanya skripsi ini dapat penulis terima dengan senang hati. Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Semarang, April 2019

Nadya Zaqiyatun Nuha

SARI

Nuha, Nadya Zaqiyatun. 2019. “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2017”. Skripsi. Jurusan Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Karsinah SE., M.Si.

Kata Kunci : Pertumbuhan Ekonomi, PAD, Belanja Modal, IPM, Jumlah Penduduk

Secara administratif Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota. Pertumbuhan Ekonomi tingkat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah belum merata, hal ini dikarenakan nilai laju pertumbuhan ekonominya masih fluktuatif dan terdapat 6 kabupaten dengan tingkat pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh PAD, Belanja Modal, Jumlah Penduduk dan IPM terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2017.

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini juga menggabungkan 2 jenis data yaitu data *time series* dan data *cross section*. Variabel penelitian ini terdiri dari dua yaitu variabel dependent yaitu Pertumbuhan Ekonomi dan Variabel independent yaitu PAD, Belanja Modal, Jumlah Penduduk dan IPM. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan model *Random Effect*.

Hasil dari penelitian ini adalah variabel PAD, Belanja Modal, Jumlah Penduduk dan IPM berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2017 dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Variabel PAD, Belanja Modal dan Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi sedangkan, variabel IPM berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2017.

Saran dari penelitian ini adalah pemerintah daerah hendaknya mengoptimalkan potensi daerahnya masing-masing untuk mendapatkan sumber keuangan yang digunakan untuk melakukan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi lebih diarahkan untuk keperluan publik seperti membangun infrastruktur yang baik sehingga mendorong investor menciptakan lapangan kerja bagi penduduknya. Jumlah penduduk yang semakin meningkat memungkinkan untuk mencari lapangan kerja yang sesuai dengan kualitasnya.

ABSTRACT

Nuha, Nadya Zaqiyatun. 2019."Factors Affecting Economic Growth Districts and Cities in Central Java province Years 2011-2017". Essay. Department of Economic Development. Faculty of Economics. Semarang State University. Supervising Karsinah SE., M.Sc.

Keywords: Economic Growth, PAD, Capital Expenditure, IPM, Population

Administratively Central Java province consists of 29 districts and 6 cities. Economic growth at the district / city in Central Java province has not been evenly distributed, this is because the value of its economic growth rate is still volatile and there are 6 districts with economic growth below average. The purpose of this study was to analyze the effect of PAD, Capital Expenditure, Population and Economic Growth in IPM against counties and cities in Central Java province in 2011-2017.

This type of research is quantitative. Data used in this research is secondary data sourced from the Central Statistics Agency (BPS) Central Java Province. The study also combine two types of data are time series data and data cross section. Variabel this study consisted of two that is the dependent variable, namely Growth and independent variables namely PAD, Capital Expenditure, Population and IPM. Analytical techniques that are used are panel data regression model with Random Effect.

The results of this study are variable PAD, Capital Expenditure, Population and HDI significantly influence economic growth districts in Central Java province in 2011-2017 with a significance level of 5%. Variable PAD, Capital Expenditure and Population positive effect on economic growth while, HDI variables negatively affect economic growth and city districts in Central Java province in 2011-2017.

Suggestions from this study is the local government should optimize the potential of each region to obtain financial resources used to carry out economic development. Economic development geared more for public purposes such as building a good infastruktur, prompting investors mencipakan employment for its population. The population is increasing impossible to find jobs in accordance with their quality.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN KELULUSAN.....	v
PERNYATAAN	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
PRAKATA	vi
SARI	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Orisinalitas Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Kajian Teori	14
2.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi.....	14
2.2 Otonomi Daerah dan Asas Desentralisasi	17
2.3 Kajian Variabel	19

2.3.1 Pengaruh PAD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	19
2.3.2 Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	21
2.3.3 Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	24
2.3.4 Pengaruh IPM terhadap Pertumbuhan Ekonomi	26
2.4 Penelitian Terdahulu	27
2.5 Kerangka Berpikir	30
2.6 Hipotesis Penelitian.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1 Jenis Penelitian.....	34
3.2 Jenis dan Sumber Data	34
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	36
3.4 Identifikasi Variabel.....	36
3.5 Definisi Operasional Variabel	37
3.6 Metode Analisis Data	40
3.7 Persamaan Model Regresi	45
3.8 Pengujian Signifikansi Hipotesis	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	48
4.1 Gambaran Umum Variabel Penelitian	48
4.1.1 Pertumbuhan Ekonomi.....	48
4.1.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	49
4.1.3 Belanja Modal.....	51
4.1.4 Jumlah Penduduk	52
4.1.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	53
4.2 Hasil Analisis	54

4.2.1 Uji Chow	54
4.2.2 Uji Hausman	55
4.2.3 Uji <i>Lagrange Multiplier</i>	55
4.2.4 Hasil Persamaan Regresi	56
4.2.5 Uji Signifikansi Hipotesis.....	58
4.3 Pembahasan	60
4.3.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi .	60
4.3.2 Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	62
4.3.3 Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi	65
4.3.4 Pengaruh IPM terhadap Pertumbuhan Ekonomi	67
BAB V PENUTUP	70
5.1 Kesimpulan	70
5.2 Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	75

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2011-2017 (dalam satuan %)	2
Tabel 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 -2017 (dalam satuan %)	3
Tabel 1.3 Rata-rata Penerimaan PAD dan Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2017 (dalam satuan miliar rupiah)	6
Tabel 4.1 Hasil Uji Chow	54
Tabel 4.2 Hasil Uji Hausman	55
Tabel 4.3 Hasil Uji LM	56
Tabel 4.4 Hasil Estimasi Random Effect	57
Tabel 4.8 Hasil Uji Parsial	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	31
Gambar 4.1 Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 -2017 (dalam satuan %)	48
Gambar 4.3 Rata-rata Penerimaan Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2017 (dalam satuan miliar rupiah)	51
Gambar 4.4 Rata-rata Jumlah Penduduk pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2017 (dalam satuan ribu jiwa)	52
Gambar 4.5 Rata-rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2017 (dalam satuan indeks)	53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabulasi Data	76
Lampiran 2 Hasil Estimasi Common Effect Model	86
Lampiran 3 Hasil Estimasi Fixed Effect Model	87
Lampiran 4 Hasil Estimasi Random Effect Model	88
Lampiran 5 Hasil Uji Chow	89
Lampiran 6 Hasil Uji Hausman	90
Lampiran 7 Hasil Uji LM	91

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Menurut Kuncoro suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila tingkat kegiatannya lebih tinggi dari pada apa yang dicapai sebelumnya (Kuncoro, 2004). Menurut Sukirno pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlaku tahun ke tahun, sehingga untuk mengetahuinya harus diadakan perbandingan pendapatan nasional dari tahun ke tahun yang dikenal dengan laju pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2005).

Indonesia secara administratif terbagi menjadi 34 provinsi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan ekonomi tingkat provinsi di Indonesia masih fluktuatif dan tidak merata, hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi tingkat provinsi di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami angka yang tidak stabil, selain itu pertumbuhan ekonomi tertinggi hanya terjadi pada provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Pulau Jawa sendiri terdiri dari 6 Provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Banten. Berikut ini adalah tabel pertumbuhan ekonomi tingkat provinsi yang ada di Pulau Jawa tahun 2011-2017:

Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2011-2017 (dalam satuan %)

No	Provinsi	Tahun							Rata-rata
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	DKI Jakarta	6,31	6,13	5,72	5,58	5,58	5,55	5,85	5,82
2	Jawa Barat	6,10	6,11	5,96	4,84	4,81	5,35	5,02	5,46
3	Jawa Tengah	5,29	4,70	4,98	4,79	5,20	5,15	4,69	4,97
4	DI Yogyakarta	4,95	5,09	5,19	4,91	4,72	4,81	5,00	4,95
5	Jawa Timur	6,05	6,23	5,73	5,54	5,16	5,28	5,17	5,59
6	Banten	6,57	6,39	6,26	5,22	5,16	5,01	5,40	5,72

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi, diolah

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi tingkat provinsi di Pulau Jawa tahun 2011-2017 masih berfluktuatif, hal ini dikarenakan nilai pertumbuhan ekonomi pada provinsi di Pulau Jawa mengalami angka yang tidak stabil dari tahun ke tahun. Provinsi yang memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi tahun 2011-2017 di Pulau Jawa adalah Provinsi DKI Jakarta sebesar 6,82% sedangkan provinsi yang memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi terendah tahun 2011-2017 di Pulau Jawa adalah Provinsi DI Yogyakarta sebesar 4,95%, lalu Provinsi Jawa Tengah sebesar 5,02%.

Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan nilai *Produk Domestik Regional Bruto* (PDRB) harga konstan yang dihasilkan oleh daerah setiap tahun. Nilai PDRB tingkat provinsi merupakan total dari PDRB yang dihasilkan oleh kabupaten/kota setiap tahun. Provinsi Jawa Tengah secara administratif terbagi menjadi 29 kabupaten dan 6 kota. Berikut ini adalah pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2017 :

Tabel 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 -2017 (dalam satuan %)

No	Kabupaten/ Kota	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Rata- rata
1	Kab. Cilacap	3,91	1,94	1,63	2,84	5,62	4,82	2,39	3,31
2	Kab. Banyumas	6,20	5,56	6,52	5,36	5,77	5,71	5,96	5,87
3	Kab. Purbalingga	5,36	5,47	5,01	4,62	5,19	4,57	4,87	5,01
4	Kab. Banjarnegara	5,15	4,97	5,16	5,05	5,19	5,13	5,14	5,11
5	Kab. Kebumen	5,80	4,66	4,37	5,47	5,91	4,73	4,66	5,09
6	Kab. Purworejo	5,34	4,38	4,71	4,29	5,06	4,87	4,89	4,79
7	Kab. Wonosobo	5,10	4,49	3,85	4,57	4,46	4,88	3,07	4,35
8	Kab. Magelang	6,26	4,65	5,58	5,10	4,92	5,09	4,82	5,20
9	Kab. Boyolali	5,96	5,06	5,51	5,14	5,62	5,03	5,23	5,37
10	Kab. Klaten	5,92	5,40	5,63	5,52	5,03	4,89	4,82	5,31
11	Kab. Sukoharjo	5,56	5,58	5,46	5,12	5,38	5,40	5,41	5,42
12	Kab. Wonogiri	3,45	5,60	4,56	4,99	5,12	4,97	4,91	4,80
13	Kab. Karanganyar	4,72	5,57	5,39	4,96	4,81	5,09	5,23	5,11
14	Kab. Sragen	6,15	5,76	6,28	5,29	5,71	5,43	5,49	5,73
15	Kab. Grobogan	3,09	4,84	4,37	3,91	5,63	4,27	5,35	4,49
16	Kab. Blora	4,23	4,67	5,09	4,21	5,09	19,05	5,52	6,84
17	Kab. Rembang	4,94	5,05	5,15	4,90	5,22	4,97	5,82	5,15
18	Kab. Pati	5,58	5,60	5,63	4,43	5,67	5,17	5,12	5,32
19	Kab. Kudus	4,06	3,94	4,18	4,24	3,74	2,46	2,88	3,64
20	Kab. Jepara	4,69	5,54	5,11	4,59	4,86	4,78	4,88	4,92
21	Kab. Demak	5,12	4,27	5,01	4,11	5,60	4,81	5,27	4,88
22	Kab. Semarang	5,90	5,68	5,63	5,52	5,23	5,00	5,19	5,45
23	Kab. Temanggung	5,74	4,09	4,94	4,79	4,98	4,74	4,47	4,82
24	Kab. Kendal	6,16	4,95	5,85	4,89	4,95	5,24	5,27	5,33
25	Kab. Batang	5,76	4,42	5,55	5,04	5,15	4,75	5,02	5,10
26	Kab. Pekalongan	5,35	4,59	5,65	4,72	4,57	4,91	5,01	4,97
27	Kab. Pemasang	4,77	5,05	5,28	5,23	5,28	5,11	5,12	5,12
28	Kab. Tegal	6,01	4,97	6,30	4,79	5,20	5,59	5,10	5,42
29	Kab. Brebes	6,23	4,38	5,58	5,03	5,64	4,83	5,19	5,27
30	Kota Magelang	5,76	5,10	5,70	4,75	4,86	4,92	4,92	5,14
31	Kota Surakarta	6,03	5,29	5,88	5,01	5,16	5,05	5,06	5,36
32	Kota Salatiga	6,18	5,24	5,93	5,27	4,91	4,96	4,95	5,35
33	Kota Semarang	6,17	5,63	5,88	5,94	5,50	5,52	5,34	5,71
34	Kota Pekalongan	5,21	5,31	5,58	5,20	4,76	5,09	5,06	5,17
35	Kota Tegal	6,07	4,04	5,36	4,79	5,17	5,15	5,17	5,11
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah		5,29	4,70	4,98	4,79	5,20	5,15	4,69	4,97

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, diolah

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi tingkat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2017 mengalami angka yang fluktuatif karena nilai pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota tersebut dari tahun ke tahun mengalami angka yang tidak stabil. Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota. Kabupaten Banyumas memiliki nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 5,87% sedangkan, nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi terendah tahun 2011-2017 adalah Kabupaten Cilacap sebesar 3,31%.

Menurut Tabel 1.2 rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2011-2017 sebesar 4,97%, diketahui terdapat 6 kabupaten yang memiliki nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi dibawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2017 yaitu Kabupaten Cilacap, Purworejo, Wonosobo, Wonogiri, Temanggung dan Jepara. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cilacap sebesar 3,31%, Kabupaten Purworejo sebesar 4,79%, Kabupaten Wonosobo sebesar 4,35%, Kabupaten Wonogiri sebesar 4,80%, Kabupaten Temanggung sebesar 4,82% dan Kabupaten Jepara sebesar 4,92%.

Indonesia adalah negara yang mengakui adanya otonomi daerah dan asas desentralisasi sesuai dengan Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Berdasarkan Undang-undang No.23 Tahun 2014, yang dimaksud otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Asas Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom.

Adanya otonomi daerah dan asas desentralisasi tersebut dimanfaatkan oleh daerah untuk menggali sumber-sumber keuangan daerah yang nantinya akan digunakan untuk melakukan pembangunan ekonomi daerah. Sumber-sumber keuangan daerah akibat dari adanya otonomi dan desentralisasi tersebut salah satunya berasal dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, adanya otonomi daerah dan desentralisasi ini memberikan pemerintah daerah hak untuk mengatur pengeluaran daerahnya masing-masing dalam bentuk belanja daerah. Salah satu bentuk belanja daerah adalah belanja modal. Belanja modal digunakan untuk membangun infrastruktur yang nantinya diharapkan akan memperlancar proses pembangunan sehingga akan mendorong adanya pertumbuhan ekonomi. Berikut ini adalah rata-rata penerimaan PAD, dan Belanja Modal masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2017:

Tabel 1.3 Rata-rata Penerimaan PAD dan Belanja Modal Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2017 (dalam satuan miliar rupiah)

No	Kabupaten/ Kota	PAD	BELANJA MODAL
1	Kab. Cilacap	317,1489	490,19
2	Kab. Banyumas	394,0409	324,09
3	Kab. Purbalingga	178,2488	191,05
4	Kab. Banjarnegara	142,7908	274,75
5	Kab. Kebumen	197,0533	403,63
6	Kab. Purworejo	343,3655	218,06
7	Kab. Wonosobo	142,7492	223,95
8	Kab. Magelang	208,6575	238,41
9	Kab. Boyolali	203,7527	285,02
10	Kab. Klaten	153,4497	232,86
11	Kab. Sukoharjo	241,2777	241,11
12	Kab. Wonogiri	156,1889	260,93
13	Kab. Karanganyar	205,0107	201,75
14	Kab. Sragen	206,6308	225,02
15	Kab. Grobogan	205,7397	307,38
16	Kab. Blora	100,9689	291,82
17	Kab. Rembang	161,9096	207,21
18	Kab. Pati	238,4772	240,02
19	Kab. Kudus	206,266	320,19
20	Kab. Jepara	209,5724	290,14
21	Kab. Demak	190,8974	356,38
22	Kab. Semarang	239,6097	260,27
23	Kab. Temanggung	161,2198	253,28
24	Kab. Kendal	194,0702	249,11
25	Kab. Batang	149,1475	168,35
26	Kab. Pekalongan	208,9585	201,76
27	Kab. Pemasang	183,7861	208,36
28	Kab. Tegal	223,0024	295,89
29	Kab. Brebes	228,2044	389,30
30	Kota Magelang	148,6707	143,02
31	Kota Surakarta	331,7813	264,80
32	Kota Salatiga	134,5119	136,00
33	Kota Semarang	1068,395	807,88
34	Kota Pekalongan	134,4461	154,10
35	Kota Tegal	219,0008	156,84
	RATA-RATA	229,40	271,80

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, diolah

Berdasarkan Tabel 1.3 dapat diketahui bahwa rata-rata penerimaan PAD tahun 2011-2017 pada 29 kabupaten dan 6 kota di Provinsi Jawa Tengah adalah 229,40 miliar rupiah, dengan rata-rata penerimaan PAD tertinggi adalah Kota Semarang sebesar 1068,395 miliar rupiah. Apabila dilihat dari rata-rata penerimaan PAD masih banyak kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah dengan penerimaan PAD dibawah rata-rata. Rata-rata penerimaan Belanja Modal pada 29 kabupaten dan 6 kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2017 sebesar 271,80 miliar rupiah, Belanja Modal tertinggi adalah Kota Semarang sebesar 807,88 miliar rupiah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) digunakan sebagai sumber keuangan untuk pembiayaan pembangunan daerah. Peningkatan PAD secara signifikan menunjukkan kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan serta memakmurkan masyarakatnya, masyarakatlah yang merangsang peningkatan ekonomi regional dengan melakukan investasi maupun belanja (Rahman, 2015). Menurut Kuncoro (2004) pembangunan sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi, karena merupakan salah satu alternatif untuk mengundang investor. Selain faktor otonomi daerah dan desentralisasi yang diduga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi regional, faktor jumlah penduduk dan kualitas penduduk juga dapat mempengaruhi.

Menurut teori pertumbuhan klasik apabila terdapat kekurangan penduduk, produksi marjinal akan lebih tinggi dari pada pendapatan perkapita. Akan tetapi, apabila penduduk semakin banyak hukum hasil tambah yang semakin berkurang akan mempengaruhi fungsi produksi, yaitu produksi marjinal akan mulai

mengalami penurunan, teori ini dinamakan teori penduduk optimum. Oleh karenanya pendapatan nasional dan pendapatan perkapita semakin lambat pertumbuhannya. Menurut Sukirno apabila penduduk sudah terlalu banyak, pertambahannya akan menurunkan tingkat kegiatan ekonomi karena produktivitas setiap penduduk telah menjadi negatif.

Selain itu, kualitas penduduk juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pembangunan manusia merupakan salah satu indikator terciptanya pembangunan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi (Rakhmawati, 2016). United Nation Development Program (UNDP) memperkenalkan konsep mutu modal manusia yang diberi nama *Human Development Index* atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tingkat pembangunan manusia yang tinggi sangat menentukan kemampuan penduduk dalam menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, baik kaitannya dengan teknologi maupun terhadap kelembagaan sebagai sarana penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel. Regresi data panel digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel dependent terhadap variabel independent dalam penelitian. Digunakan data panel karena pada penelitian digunakan 2 jenis data yang berbeda yaitu data *time series* dan *cross section*. Data *time series* merupakan data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu sedangkan data *cross section* merupakan data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak individu (Nacrowi, 2006).

1.2 Rumusan Masalah

Nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2017 sebesar 4,97%, nilai ini dibawah Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Timur dan Jawa Barat. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) diketahui terdapat 6 kabupaten yang memiliki nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi dibawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2017 yaitu Kabupaten Cilacap sebesar 3,31%, Kabupaten Purworejo sebesar 4,79%, Kabupaten Wonosobo sebesar 4,35%, Kabupaten Wonogiri sebesar 4,80%, Kabupaten Temanggung sebesar 4,82% dan Kabupaten Jepara sebesar 4,92%. Selain itu, dari tahun 2011-2017 nilai pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa tengah mengalami angka yang fluktuatif. Berdasarkan permasalahan tersebut diperlukan sebuah penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang diduga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tingkat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2017.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber keuangan akibat adanya Otonomi daerah dan asas desentralisasi yang nantinya digunakan untuk melakukan pembangunan ekonomi pada daerah. Selain itu, pengeluaran pemerintah daerah dalam bentuk belanja modal digunakan untuk membangun infrastruktur yang nantinya diharapkan akan memperlancar proses pembangunan ekonomi pada daerah sehingga akan mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi pada masing-masing daerah.

Pertumbuhan ekonomi tidak akan terjadi tanpa penduduk. Menurut teori pertumbuhan klasik apabila terdapat kekurangan penduduk, produksi marginal akan lebih tinggi dari pada pendapatan perkapita. Akan tetapi, apabila penduduk semakin banyak hukum hasil tambah yang semakin berkurang akan

mempengaruhi fungsi produksi, yaitu produksi marjinal akan mulai mengalami penurunan, teori ini dinamakan teori penduduk optimum. Oleh karenanya pendapatan nasional dan pendapatan perkapita semakin lambat pertumbuhannya. Menurut Sukirno apabila penduduk sudah terlalu banyak, pertumbuhannya akan menurunkan tingkat kegiatan ekonomi karena produktivitas setiap penduduk telah menjadi negatif.

Selain itu, penduduk yang memiliki kualitas baik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pembangunan manusia merupakan salah satu indikator terciptanya pembangunan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Tingkat pembangunan manusia yang tinggi sangat menentukan kemampuan penduduk dalam menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, baik kaitannya dengan teknologi maupun terhadap kelembagaan sebagai sarana penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Salah satu kualitas penduduk dapat diukur dari perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka uraian pertanyaan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada 29 kabupaten dan 6 kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2017 ?
2. Bagaimana pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada 29 kabupaten dan 6 kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2017 ?

3. Bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada 29 kabupaten dan 6 kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2017 ?
4. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada 29 kabupaten dan 6 kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2017 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan uraian yang hendak dicapai dalam sebuah penelitian. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya maka terdapat 5 tujuan dari penelitian ini, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada 29 kabupaten dan 6 kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2017;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada 29 kabupaten dan 6 kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2017;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada 29 kabupaten dan 6 kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2017;
4. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada 29 kabupaten dan 6 kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2017;

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1) Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber acuan dan sumber referensi untuk berbagai penelitian selanjutnya terkait topik pertumbuhan ekonomi di wilayah regional. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi sasaran penerapan dan peningkatan pemahaman terhadap ilmu pengetahuan dan wawasan ekonomi regional.

2) Manfaat Secara Praktis

Bagi pemerintah khususnya pemerintah daerah selaku perencana dan pengambil keputusan, di harapkan penulisan skripsi ini dapat di jadikan bahan evaluasi dan dasar pengambilan kebijakan ekonomi dalam merencanakan strategi pembangunan yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di wilayah regional secara merata.

1.5 Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi pada 29 kabupaten dan 6 kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2017. Data Pertumbuhan Ekonomi dihitung dari data PDRB harga konstan seri 2010 pada 29 kabupaten dan 6 kota Provinsi Jawa Tengah, yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah. Faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, Jumlah Penduduk dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pemilihan faktor-faktor

tersebut berdasarkan teori dan pendapat para ahli ekonomi yang bersumber dari literatur seperti buku dan jurnal ilmiah.

Penelitian serupa telah banyak dilakukan seperti penelitian oleh Dina Apriana dan Rudy Suryanto (2010), Indra Rukmana (2012), Eko Wicaksono Pambudi (2013), Agung Priambodo (2014), Yozi Aulia Rahman dan Ayunda Lintang Chamelia (2015), Rusmarinda Rakhmawati (2016), Dodi Chandra, Hidayat dan Rosmeli (2017), Adinda Putri Hapsari dan Deden Dinar Iskandar (2018). Penelitian ini dan penelitian sebelumnya memiliki perbedaan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada:

1. Pemilihan Variabel Penelitian,
2. Pemilihan sampel penelitian,
3. Alat analisis yang dipakai dalam penelitian,
4. Hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.

Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik, ada 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu: jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang digunakan. Namun para pakar ekonomi klasik pada umumnya hanya menitikberatkan pada pengaruh penambahan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi. Teori yang menyatakan keterkaitan antara pendapatan dan jumlah penduduk dinamakan teori penduduk optimum.

Teori penduduk optimum menyatakan apabila terdapat kekurangan penduduk, produksi marginal akan lebih tinggi dari pada pendapatan per kapita. Akan tetapi apabila penduduk semakin banyak, hukum hasil tambahan yang semakin berkurang akan mempengaruhi fungsi produksi, yaitu produksi marginal

akan mulai mengalami penurunan. Oleh karenanya pendapatan nasional dan pendapatan per kapita menjadi semakin lambat pertumbuhannya.

Teori pertumbuhan ekonomi menurut Adam Smith dalam bukunya "*An Inquiry into the nature and causes of the wealth of the nation*" tahun 1776, menurut Adam Smith ditandai oleh dua faktor yang saling berkaitan yaitu: Pertumbuhan penduduk dan Pertumbuhan output total. Pertumbuhan output yang akan dicapai dipengaruhi oleh 3 komponen yaitu sumber-sumber alam, tenaga kerja (pertumbuhan penduduk), dan jumlah persediaan. Inti ajaran Smith adalah masyarakat diberi kebebasan seluas-luasnya dalam menentukan kegiatan ekonomi apa yang dirasanya terbaik untuk dilakukan.

Teori Smith yang terkenal dengan "*The Invisible Hand*" mengajarkan bahwa sistem ekonomi pasar bebas akan menciptakan efisiensi, membawa ekonomi kepada kondisi *full employment* dan menjamin pertumbuhan ekonomi sampai tercapai posisi stasioner. Posisi stasioner terjadi apabila sumber daya alam telah seluruhnya dimanfaatkan. Pemerintah tidak perlu terlalu mencampuri urusan perekonomian. Peran pemerintah adalah menjamin keamanan, ketertiban dan memberi kepastian hukum serta keadilan bagi para pelaku ekonomi.

Pandangan Smith ini dikoreksi oleh Jhon Maynard Keynes (1936) dengan mengatakan bahwa untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang stabil pemerintah perlu menerapkan kebijakan fiskal (perpajakan dan perebelanjaan pemerintah), kebijakan moneter (tingkat suku bunga dan jumlah uang beredar).

David Ricardo dan TR Malthus mengkritik pernyataan Smith bahwa pertumbuhan penduduk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. David Ricardo berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk yang terlalu besar hingga dua kali lipat dapat menyebabkan melimpahnya tenaga kerja. Tenaga kerja yang melimpah menyebabkan upah yang diterima menurun, dimana upah tersebut hanya bisa untuk membiayai tingkat hidup minimum. Pada taraf ini perekonomian mengalami stagnasi atau kemandegan yang disebut *Stationary State*.

Pendapat tersebut didukung dengan teori dari Thomas Malthus tentang hubungan antara pertumbuhan penduduk dan pembangunannya ekonomi, dalam bukunya yang berjudul "*Essay On The Principle of Population*" tahun 1789, Thomas Malthus merumuskan sebuah konsep tentang pertambahan hasil yang semakin berkurang (*diminishing returns*). Lebih lanjut, Thomas Malthus melukiskan suatu kecenderungan universal bahwa jumlah populasi di suatu negara (wilayah) akan meningkat sangat cepat pada deret ukur atau tingkat geometrik (pelipatan ganda: 1,2,4,6,8,16,32 dan seterusnya) setiap 30 atau 40 tahun, kecuali hal itu diredam oleh bencana kelaparan. Pada waktu yang bersamaan, karena adanya proses pertambahan hasil yang semakin berkurang dari suatu faktor produksi yang jumlahnya tetap, yaitu tanah maka persediaan pangan hanya akan meningkat menurut deret hitung atau tingkat aritmetik (1,2,3,4,5 dan seterusnya). Akibatnya, bahan makanan tidak cukup untuk menghidupi penduduk, Sehingga masyarakat hidup pada tingkat *subsistence* dan perekonomian mengalami kemandegan.

2.2 Otonomi Daerah dan Asas Desentralisasi

Indonesia adalah negara yang mengakui adanya Otonomi Daerah, dengan menganut asa otonomi sesuai dengan Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Berdasarkan Undang-undang No.23 Tahun 2014, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sisitem Negara Kesatuan Indonesia, sedangkan menurut KBBI Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mnegurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan otonomi daerah menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2004 adalah meningkatkan pelayanan masyarakat, mengembangkan kehidupan berdemokrasi, mendorong pemberdayaan masyarakat hingga menumbuhkan kreativitas masyarakat. Secara etimologi desentralisasi berasal dari bahasa latin *de* yang artinya lepas dan *centrum* yang berarti pusat. Menurut Prof. Dr. Koesoemahatmadja, S.H (1978) desentralisasi merupakan pelimpahan kekuasaan pemerintahan dari pusat kepada daerah-daerah yang mengurus urusan rumah tangganya sendiri, desentralisasi juga cara atau sistem untuk mewujudkan asas demokrasi yang memberikan kesempatan pada rakyat untuk ikut serta dalam pemerintahan negara.

Desentralisasi menurut Undang-undang No.23 tahun 2014 adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan daerah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas ekonomi. Menurut Djaenuri (2012) ada beberapa keuntungan dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi sebagai berikut :

1. Desentralisasi memberi penilaian yang lebih tepat terhadap daerah dan penduduk yang beraneka ragam;
2. Desentralisasi meringankan beban pemerintah karena pemerintah pusat tidak mungkin mengenal seluruh dan segala kepentingan dan kebutuhan setempat dan tidak mungkin pula mengetahui sedalam-dalamnya kebutuhan tersebut sebaik-baiknya. Daerahlah yang mengetahui sedalam-dalamnya kebutuhan daerah dan bagaimana memenuhinya.
3. Desentralisasi meningkatkan turut sertanya masyarakat setempat dalam melakukan kontrol terhadap segala tindakan dan tingkah laku pemerintah, hal ini dapat menghasilkan pemborosan dan dalam hal tertentu, desentralisasi dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna.

2.3 Kajian Variabel

2.3.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD merupakan kelompok pendapatan dalam struktur APBD. PAD terdiri dari hasil pajak dan retribusi daerah, Hasil Perusahaan Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, serta lain-lain usaha daerah yang sah dan diatur dalam perundang-undangan.

PAD diduga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi karena salah satu tujuan utama desentralisasi adalah menciptakan suatu kemandirian daerah dalam mendorong pembangunan ekonominya dengan sedikit campur tangan pemerintah pusat (Undang-undang No. 32 tahun 2004). Dalam hal ini berarti bahwa pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan lokal yang dimiliki oleh daerah tersebut, terkhusus melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Apabila PAD mengalami peningkatan yang cukup besar maka ini akan berdampak pada dana yang dimiliki oleh daerah juga akan semakin besar. Pembangunan ekonomi suatu daerah membutuhkan sejumlah dana yang diperoleh atau berasal dari berbagai sumber yang dikelola oleh daerah.

Dalam otonomi daerah pembangunan ekonomi suatu daerah dilakukan berdasarkan kemampuan pendapatan daerah karena hak atas pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah dan pembangunan ekonomi di daerah, telah diserahkan

secara otonom kepada Pemerintah Daerah yaitu Pemerintah Kabupaten dan Kota. Daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan PAD. Peningkatan PAD secara signifikan menunjukkan kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhannya serta memakmurkan masyarakatnya. Masyarakatlah yang kemudian dapat merangsang peningkatan ekonomi regional dengan melakukan aktifitas investasi maupun belanja (Rahman, 2015).

Upaya peningkatan pertumbuhan pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi yang sudah ada. Hal ini tidak mungkin terjadi apabila tidak terjadi peningkatan peran serta masyarakat yang tercermin dalam pembayaran pajak ataupun retribusi (Fitriyani, 2009). Sistem pemerintahan yang terdesentralisasi juga memiliki beberapa konsekuensi negatif. Ada masalah potensial lain yang berkaitan dengan Desentralisasi. Beberapa penelitian telah menemukan bahwa sistem pemerintahan yang terdesentralisasi bertendensi menimbulkan korupsi, kolusi dan juga instabilitas makroekonomi. Akibat dari adanya korupsi kolusi dan instabilitas makroekonomi membuat pertumbuhan ekonomi terhambat (Khusaini, 2018). Oleh karena itu diperlukan keterbukaan dari pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya.

Desentralisasi fiskal di negara-negara berkembang apabila tidak berpegang pada standar teori desentralisasi, hasilnya mungkin akan merugikan kondisi ekonomi dan efisiensi. Desentralisasi fiskal memungkinkan untuk melakukan korupsi pada level lokal/daerah. Oleh karena itu, peningkatan PAD juga berpotensi akan dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut

apabila terjadi korupsi. Peningkatan PAD juga tidak langsung berkorelasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini disebabkan peningkatan pendapatan asli daerah tidak serta merta meningkatkan daya beli masyarakat maupun kesejahteraannya (Rahman, 2015).

Penelitian yang dilakukan Dina Apriana dan Rudy Suryanto (2010), menghasilkan PAD berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten dan kota sejawara Bali. Hasil ini sama dengan penelitian Yozi Aulia Raman dan Yulinda Lintang Chamelia (2015) yaitu PAD berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2008-2012. Sedangkan penelitian oleh Agung Priambodo PAD berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Begitu pula hasil penelitian oleh Teuku Zulham, dkk (2015) menunjukkan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.3.2 Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Desentralisasi dari sisi ekonomi mempunyai keuntungan bahwa program-program pembangunan pemerintah dalam bidang ekonomi lebih diarahkan pada kepentingan daerah dan disesuaikan dengan lingkungan daerah setempat. Hal ini terjadi karena pemerintah daerah dengan jelas lebih mengetahui tentang keadaan daerahnya dari pada pemerintah pusat. Selama pemerintah daerah dapat memenuhi keinginan dan keperluan masyarakat, mereka akan menjadi lebih responsif dalam menunjukkan permintaan mereka yang pada akhirnya membuat pemerintah daerah lebih bertanggungjawab atas berbagai jasa-jasa publik sampai

mencapai titik dimana jumlah marginal dari jasa-jasa tersebut sama dengan benefit yang mereka terima (efektif dan efisien). Dengan demikian kesediaan masyarakat untuk membayar (*willingness to pay*) akan meningkat jika jasa-jasa yang diberikan pemerintah daerah sesuai dengan permintaan masyarakat setempat, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan bagi pemerintah daerah tersebut (Khusaini, 2018).

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Belanja modal termasuk dalam struktur APBD bagian belanja daerah dan termasuk belanja daerah yang sifatnya langsung.

Menurut Todaro (2004) ada tiga faktor atau komponen utama pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa. Ketiga faktor tersebut adalah (1) akumulasi modal yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumberdaya manusia; (2) pertumbuhan penduduk; dan (3) kemajuan teknologi. Dalam hal ini pengeluaran pemerintah berperan dalam pembentukan modal untuk membiayai pembangunan diberbagai bidang seperti sarana dan prasarana publik. Kuncoro (2004) menemukan bahwa pembangunan sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu alternatif yang dapat dilakukan untuk mengundang

investor. Dengan demikian, diharapkan belanja yang dilakukan pemerintah daerah dapat merangsang pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam fungsi produksi, belanja modal merupakan bagian dari *capital* yang bersumber dari belanja langsung pemerintah. Adanya hubungan positif antara belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi ini menandakan bahwa pengeluaran pemerintah sudah digunakan secara efisien serta terserap dengan baik. Belanja modal yang dialokasikan dengan baik akan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara keseluruhan. Manfaat ini dapat dilihat dari meningkatnya pembangunan, kemudahan dalam mengakses fasilitas pelayanan publik, serta infrastruktur yang dapat mendukung kegiatan produksi dalam perekonomian.

Teori *Agregat Demand - Agregat Suply* dinyatakan pula bahwa jika pengeluaran pemerintah meningkat, maka *Agregat Demand* atau AD akan meningkat. Selain itu, peranan pengeluaran pemerintah di negara sedang berkembang sangat signifikan mengingat kemampuan sektor swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi relatif terbatas sehingga peranan pemerintah sangat penting. Peningkatan *Agregat Demand* berarti terjadi pertumbuhan ekonomi karena pertumbuhan ekonomi diukur dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), maka peningkatan PDRB berarti peningkatan pendapatan.

Hasil penelitian oleh Agung Priambodo (2014) menunjukkan Belanja Modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2008-2012. Sedangkan penelitian Adinda Putri Hapsari dan Deden Dinar Iskandar (2018) menunjukkan

belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa tengah tahun 2010-2014.

Pada penelitian Yozi Aulia Rahman dan Ayunda Linda Chamelia (2015), belanja daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Terdapat beberapa alasan yang memungkinkan menyebabkan belanja daerah tidak berpengaruh terhadap PDRB, (1) penyerapan anggaran terutama belanja fisik tidak maksimal dan lebih banyak dilakukan pelaksanaan program pada semester II , (2) maraknya praktek korupsi yang dilakukan oleh beberapa oknum pejabat daerah yang sangat menghambat pelaksanaan pembangunan di daerah , (3) porsi belanja non fisik, seperti belanja pegawai melebihi porsi anggaran belanja fisik , apalagi jika aparatur daerah bekerja tidak maksimal dan kurang produktif , (4) ketimpangan dalam penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBHSDA), daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah akan menerima DBHSDA yang tinggi, sedangkan daerah yang tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah akan menerima DBHSDA yang rendah.

2.3.3 Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili diwilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Teori pertumbuhan klasik menyatakan apabila terdapat kekurangan penduduk, produksi marjinal akan lebih tinggi dari pada pendapatan per kapita. Akan tetapi apabila penduduk semakin banyak, hukum hasil tambahan yang semakin berkurang akan mempengaruhi fungsi produksi, yaitu produksi marjinal akan mulai mengalami penurunan (teori

penduduk optimum). Oleh karenanya pendapatan nasional dan pendapatan per kapita menjadi semakin lambat pertumbuhannya.

David Ricardo berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk yang terlalu besar hingga dua kali lipat dapat menyebabkan melimpahnya tenaga kerja. Tenaga kerja yang melimpah menyebabkan upah yang diterima menurun, dimana upah tersebut hanya bisa untuk membiayai tingkat hidup minimum. Pada taraf ini perekonomian mengalami stagnasi atau kemandegan yang disebut *Stationary State* . Ini berarti pertumbuhan ekonomi tidak akan terus menerus berlangsung (Arsyad, 1999).

Pada permulaannya, apabila penduduk sedikit dan kekayaan alam relatif berlebihan, tingkat pengembalian modal dari investasi yang dibuat adalah tinggi. Maka para pengusaha akan mendapatkan keuntungan yang besar. Ini akan mendapatkan investasi baru dan pertumbuhan ekonomi terwujud. Keadaan seperti itu tidak akan terus-menerus berlangsung. Apabila penduduk sudah terlalu banyak, pertambahannya akan menurunkan tingkat kegiatan ekonomi karena produktivitas setiap penduduk telah menjadi negatif (Sukirno, 2005).

Hasil penelitian oleh Indra Rukmana (2012), menunjukkan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Penelitian lain oleh Adinda Putri Hapsari dan Deden Iskandar (2018) menunjukkan hasil yang sama yaitu penduduk berpengaruh positif signifikan, begitu pula dengan penelitian oleh Teuku Zulham, dkk (2015) penduduk berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.3.4 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pemikiran baru dari teori Neoklasik setelah menyatakan bahwa pentingnya transformasi dalam proses pembangunan yang baik dengan menekankan pentingnya pendidikan dan keterampilan. Pendidikan dan keterampilan akan menghasilkan sumber daya manusia (*human capital*) yang berkualitas. Selanjutnya, investasi *human capital* yang berkualitas akan menghasilkan *saving* (tabungan) dan teknologi guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas. Pembangunan manusia merupakan salah satu indikator terciptanya pembangunan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi (Rakhmawati, 2016)

United Nations Development Program (UNDP) mengenalkan konsep modal manusia yang diberi nama Human Development Index atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tingkat pembangunan manusia yang tinggi sangat menentukan kemampuan penduduk dalam menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, baik kaitannya dengan teknologi maupun terhadap kelembagaan sebagai sarana penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Salah satu mamfaat dari perhitungan IPM menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Hasil penelitian oleh Rusmrinda Rakhmawati (2016), adalah IPM berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah tahun 2013.

2.4 Penelitian Terdahulu

No	Judul, Tahun dan Penulis Penelitian	Variabel yang digunakan	Metode Analisis	Hasil
1	Analisis Hubungan Antara Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa Bali)/2010/ Dina Apriana dan Rudy Suryanto.	-Laju PDRB -PAD -Belanja Modal -Kemandirian Daerah	Analisis statistik deskriptif dan analisis jalur.	-Belanja Modal berpengaruh negative tidak signifikan pada kemandirian daerah. dengan nilai CR sebesar -1,121, -PAD berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian daerah dengan nilai CR sebesar 15,750, -Belanja modal tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai CR sebesar 0,892, -PAD berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pertumbuhan daerah dengan nilai CR sebesar 2,266, -kemandirian daerah dengan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai CR sebesar 1,094.
2	Pengaruh Disparitas Pendapatan, Jumlah Penduduk dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah Tahun 1984-2009.	-Disparitas pendapatan, -jumlah penduduk, -inflasi.	Analisis regresi semi log linear berganda dengan kuadrat terkecil atau Ordinary Least Square (OLS),	-Disparitas pendapatan dan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. -Sedangkan Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

No	Judul, Tahun dan Penulis Penelitian	Variabel yang digunakan	Metode Analisis	Hasil
	/2012/ Indra Rukmana			di Jawa Tengah.
3	Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi (Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah)/2013/ Eko Wicaksono Pambudi dan Miyaso	-Agglomerasi, -Investasi, -Angkatan kerja yang bekerja, -Human Capital Investment.	Analisis regresi data panel dengan asumsi model <i>Fixed effect</i> .	Hasil penelitian ini adalah dari 4 faktor penelitian hanya 2 yang berpengaruh dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten dan kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2006-2010 yaitu variabel Investasi dan Angkatan Kerja yang Bekerja. Investasi berpengaruh positif signifikan dengan koefisien 2,0. Sedangkan Angkatan Kerja yang Bekerja positif dan signifikan dengan koefisien 2,9.
4	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2012. /2014/ Agung Priambodo	-Pendapatan Asli Daerah, -Belanja Modal, -Tenaga Kerja..	Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan model <i>fixed effect</i> dan <i>cross-section weights</i>	PAD berpengaruh positif signifikan pada $\alpha = 5\%$ terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Belanja Modal mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan pada $\alpha = 5\%$ terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Tenaga kerja mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada $\alpha = 5\%$ terhadap pertumbuhan ekonomikabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah.

No	Judul, Tahun dan Penulis Penelitian	Variabel yang digunakan	Metode Analisis	Hasil
5	Faktor-faktor yang Mempengaruhi PDRB Kabupaten/kota Jawa Tengah Tahun 2008-2012/2015/ Yozi Aulia Rahman dan Ayunda Lintang Chamelia	<ul style="list-style-type: none"> - Tabungan - Kredit - Pendapatan Asli Daerah (PAD) - Belanja Publik 	<i>Regresi Data Panel dengan fixed Effect</i>	<ul style="list-style-type: none"> - PAD dan Belanja Publik tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa tengah tahun 2008-2012 - Tabungan dan Kredit berpengaruh positif signifikan. Dengan koefisien tabungan 0,242 dan kredit dengan koefisien 0,154.
6	<i>The Impact of Special Autonomy on the Convergence of Regional Economic Growth in Aceh, Indonesia.</i> /2015/Teuku Zulham, Said Muhammad, Raja Masbar dan Sirojuzilam	<ul style="list-style-type: none"> -PDB perkapita -penduduk yang bekerja -penduduk miskin -durasi sekolah -harapan hidup -pendapatan asli daerah -dana perimbangan -total penerimaan 	Analisis regresi panel	<ul style="list-style-type: none"> -Terdapat konvergensi sigma pertumbuhan ekonomi daerah aceh yang ditunjukkan oleh penurunan nilai standar deviasi dari 0,7698 sebelum otonomi khusus untuk 0,5411 setelah otonomi khusus. Secara absolut terdapat konvergensi signifikan. -Variabel eksogen yang berpengaruh adalah signifikan adalah pendapatan asli daerah dan durasi sekolah.
7	Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tenaga Kerja dan Pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah/2016/ Rusmarinda Rakhmawati	<ul style="list-style-type: none"> -IPM -Tenaga Kerja -Pendidikan 	<i>Ordinary Leas Square (OLs)</i>	<ul style="list-style-type: none"> -IPM berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi -Pendidikan berpengaruh berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi -tenaga kerja berpengaruh positif signifikan terhadap

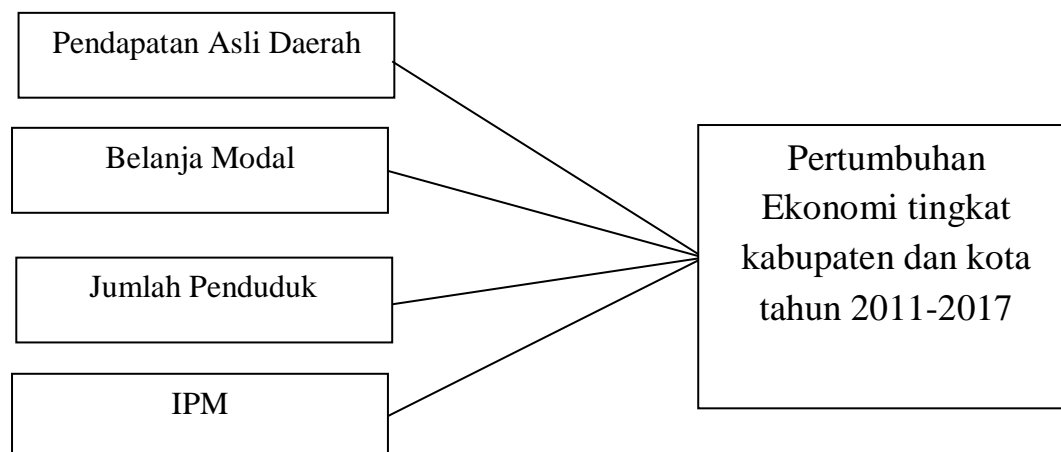
No	Judul, Tahun dan Penulis Penelitian	Variabel yang digunakan	Metode Analisis	Hasil
				pertumbuhan ekonomi.
8	Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah Periode 2010-2014. /2018/Adinda Putri Hapsari dan Deden Dinar Iskandar.	- Pertumbuhan ekonomi - belanja modal, -investasi swasta, - penduduk, - pendidikan dalam hal ini rata-rata lama sekolah (jenjang SD, SMP, SMA), dan kesehatan dalam hal ini adalah jumlah unit rumah sakit	Analisis regresi panel dengan metode <i>fixed effect</i>	-Faktor yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi adalah belanja modal, penduduk, pendidikan, dan kesehatan. -Belanja modal berpengaruh positif signifikan dengan koefisien sebesar 0,06 , -Penduduk berpengaruh positif signifikan dengan koefisien sebesar 2,605, -Pendidikan berpengaruh positif signifikan dengan koefisien sebesar 0,59, -Kesehatan berpengaruh negative signifikan dengan koefisien sebesar -0,11.

2.5 Kerangka Berpikir

Berdasarkan data dari BPS Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2011-2017 mengalami angka yg fluktuatif. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa tengah tahun 2011 sebesar 5,29%, Kemudian pada tahun 2012 turun menjadi sebesar 4,70%, tahun 2013 meningkat sebesar 4,98%, kemudian tahun 2014 turun menjadi sebesar 4,97%, kemudian tahun 2015 naik menjadi 5,20%, tahun 2016 sebesar 5,15% dan tahun 2017 sebesar 4,69%. Pertumbuhan ekonomi tingkat kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Jawa tengah juga menunjukkan angka yang fluktuatif dari tahun 2011-2017. Rata-rata pertumbuhan

ekonomi Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2011-2017 yaitu sebesar 4,97%, dari nilai ini diketahui terdapat 6 kabupaten yang memiliki nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi dibawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2017 yaitu Kabupaten Cilacap, Purworejo, Wonosobo, Wonogiri, Temanggung dan Jepara.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh PAD, Belanja Modal, Jumlah Penduduk dan IPM terhadap perubahan Pertumbuhan Ekonomi tahun 2011-2017, sehingga hasil penelitian ini akan nampak pengaruh dan besarnya pengaruh variabel independent tersebut terhadap Pertumbuhan Ekonomi kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2017. Berikut ini gambar kerangka berpikir pada penelitian ini :



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

2.6 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, landasan teori, penelitian terdahulu dan kerangka berpikir yang telah dipaparkan di atas maka, dalam penelitian ini jenis hipotesis yang digunakan adalah hipotesis dua arah (*two tailed*). Berikut ini adalah hipotesis dalam penelitian ini :

1. Hipotesis 1, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hipotesisnya adalah :

Ha : Ada pengaruh PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2017

Ho : Tidak ada pengaruh PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2017

2. Hipotesis 2, Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hipotesisnya adalah :

Ha : Ada pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2017

Ho : Tidak ada pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2017

3. Hipotesis 3, pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hipotesisnya adalah :

Ha : Ada pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2017

Ho : Tidak ada pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2017

4. Hipotesis 4, Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hipotesisnya adalah :

Ha : Ada pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2017

Ho : Tidak ada pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2017

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada 29 kabupaten dan 6 kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2017, pada tingkat signifikansi 5%. PAD berpengaruh sebesar 0.023388, Belanja Modal berpengaruh sebesar 0.289386 dan Jumlah Penduduk berpengaruh sebesar 0.289386.
2. Indeks Pembangunan Manusia memiliki pengaruh tertinggi di antara variabel lainnya sebesar -6.221976 namun, berpengaruh secara negatif dan signifikan pada tingkat signifikansi 5%.
3. Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, IPM, dan Jumlah Penduduk bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2017.

5.2 Saran

Berikut ini adalah beberapa saran yang dapat diberikan dari hasil kesimpulan pada penelitian ini :

1. Pengeluaran pemerintah daerah lebih diutamakan dalam Belanja Modal, sehingga sarana publik dan infrastruktur yang dibangun dapat menarik investor dan menciptakan lapangan pekerjaan, penduduk yang semakin meningkat akan memilih untuk bekerja di daerahnya masing-masing, sehingga pertumbuhan ekonomi daerah akan meningkat.
2. Pemerintah daerah lebih mengoptimalkan potensi-potensi ekonomi di daerahnya masing-masing sebagai sumber keuangan pembangunan daerah.
3. Penduduk diharapkan taat untuk membayar pajak dan lebih memilih mengkonsumsi produk dalam negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L., 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi daerah Edisi kedua*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Aryanto, R., 2011. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmiah, Vol.3, No.2*.
- Badan Pusat Statistik., *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Tahun 2010-2017*. : <https://www.bps.go.id>. [Accessed 2019].
- Badan Pusat Statistik., *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Tahun 2010-2017*. : <https://bps.go.id>. [Accessed 2019].
- Djaenuri, A., 2012. *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*. Bogor. Ghalia Indonesia.
- Gujarati, D., 2010. *Dasar-dasar Ekonometrika : Basic Economic*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hidayat, A., 2014. *statistikian.*, : <http://www.statistikian.com>. [Accessed 25 Mei 2019].
- Hapsari, A. P, &. Iskandar. D. D., 2014. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah Periode 2010-2014. *JIEP, Vol.18, No.1*.
- Khusaini, M., 2018. *Keuangan Daerah*. Malang: UB Press.
- Kuncoro, M., 2004. *Teori Ekonomi Pembangunan Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Pambudi, W, E, & Miyatso., 2013. Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi (kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah). *Diponegoro Journal Of Economics, Vol, No.2*.

- Nacrowi, D., 2006. *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Jakarta: FE UI.
- Priambodo, A., 2014. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa tengah Tahun 2008-2012. *EDAJ, Vol.3, No.3*.
- Prishardoyo, B., 2008. Analisis Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Dan Potensi Ekonomi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pati Tahun 2000-2005. *JEJAK, Vol.1, No.1*.
- Pujiati, A., 2008. Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Karesidenan Semarang Era Desentralisasi Fiskal. *Economic Journal of Emerging Markets, Vol.13, No.2, 60-71*.
- Rahman, Y. A., & Ayunda, L. C., 2015. Faktor-faktor yang Mempengaruhi PDRB Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2008-2011. *JEJAK, Vol.8, No.1*.
- Rakhmawati, R., 2016. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tenaga Kerja, dan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekoomi di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Rosadi, D., 2012. *Ekonometrik & Analisis Runtun Waktu Terapan*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Rumkmana, I., 2012. Pengaruh Disparitas Pendapatan Jumlah Penduduk dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah Tahun 1984-2009. *EDAJ, Vol.1, No.1*.
- Sasana, H., 2006. Analisis Dampak Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di kabupaten/Kota provinsi Jawa Tengah. *Dinamika Pembangunan , Vol.3, No.2*.
- Sugiyono, 2013. *Statistik Untuk penelitian*. Bandung: Alfabeta.

- Sukirno, S., 2005. *Pengantar Makro Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Irwan, & Suparko, M., 1998. *Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta: BPFE.
- Apriana, D., & Suryanto, R., 2010. Analisis Hubungan Antara Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan (studi pada kabupaten dan kota se-Jawa-Bali). *Jurnal Akuntansi dan Investasi*. Vol.11, No.1.
- Tarigan, R., 2007. *Ekonomi regional Teori dan Aplikasi Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Teuku Zulham, S. M. R. M. S., 2015. The Impact of Special Autonomy on the Convergence of Regional Economic Growth in Aceh Indonesia. *Aceh International Journal of Social Sciences*, Vol.4, No.1.
- Todaro, M., 2004. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- _____. *Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*.
- _____. *Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Widodo, T., 2006. Perencanaan Pembangunan : Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah). In: *Perencanaan Pembangunan : Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Winarno, W., 2009. *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.